



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

### Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI DESTRIADI SUTISNA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 1013140

#### II. DATA HARTA

##### A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.008.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m<sup>2</sup>/20 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m<sup>2</sup>/35 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 358.000.000

##### B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 330.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX ERTIGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

##### C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000

##### D. SURAT BERHARGA Rp. ---

##### E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.000.000

##### F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.450.000.000

#### III. HUTANG Rp. 550.612.180

#### IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 899.387.820

##### Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.